

Upaya Sinkronisasi Rencana Penarikan Dana dengan Realisasi Anggaran Tahun 2022

Dewi Arum Rahayuningsih^{1*}, Meidi Syaflan²

Manajemen, STIE Widya Wiwaha

arumdewisgk@gmail.com^{1*}

Manuskrip: 4 Agustus 2024; Ditinjau: 5 Agustus 2024; Diterima: 13 Agustus 2024;

Online: Agustus-2024; Diterbitkan: Agustus-2024

*Korespondensi Penulis

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan nilai indikator pada halaman III DIPA dan merumuskan upaya pencegahan terjadinya penyimpangan nilai di Kamar Kedokteran Hewan Wates. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Instrumen dalam metode wawancara adalah pedoman wawancara terstruktur. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, kemudian dianalisis secara reduksi, ditampilkan, dan ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya penyimpangan nilai adalah: (a) perencanaan yang tidak tepat; (b) penurunan jadwal belanja; (c) daftar CPCL tidak disampaikan sekaligus; (d) keterlambatan negosiasi; (e) bantuan politik; dan (f) revisi DIPA DJA tidak dilakukan pemutakhiran kembali. Upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan adalah: (a) koordinasi lintas sektoral dengan PPK; (b) mengajukan izin pembelian pada awal tahun; (c) mewujudkan RPD dan meningkatkan jumlah SDM; (d) interkoordinasi penyusunan RDP; (e) meningkatkan koordinasi dengan tim pusat; dan (f) pemutakhiran DIPA halaman III secara berkala.

Kata Kunci: Rencana Penarikan Dana; Realisasi Anggaran; Penilaian Indikator Kinerja

Abstract

The study aims to identify the cause of the deviation of the indicator value on page III of the DIPA and to formulate an effort to prevent the occurrence of deviation values in the Wates Veterinary Chamber. The method used is qualitative with a case study approach. The instrument in the interview method is the guidelines for structured interviews. Data is collected through interviews and observations, then analyzed in reduction, displayed, and drawn conclusions. The results of the research showed that the causes of the deviation values were: (a) inaccurate planning; (b) a downturn in the spending schedule; (c) the CPCL list was not submitted at once; (d) a delay in negotiations; (e) political assistance; and (f) the DIPA DJA revision was not updated again. Efforts to prevent the occurrence of deviations are: (a) intersectoral coordination with the PPK; (b) applying for purchase permits early in the year; (c) realizing the RPD and increasing the number of SDMs; (d) intercoordination to compile the RDP; (e) improving coordination with the center team; and (f) updating page III of the DIPA on a regular basis.

Keywords: Fund Withdrawal Plan; Budget Realization; Performance Indicators Assessment

PENDAHULUAN

Pengukuran kinerja sektor publik penting dilakukan untuk menilai sejauh mana satuan kerja bisa melaksanakan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah diterapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah (Risqon, 2012). Salah satu permasalahan pelaksanaan anggaran adalah tingginya deviasi antara rencana dengan realisasi belanja satuan kerja K/L. Rencana penarikan dana memiliki akurasi tinggi, jika nilai persentase deviasinya lebih rendah atau sama dengan 5%. Akurasi sedang, jika nilai persentase deviasinya di atas 5% sampai dengan 15%. Sedangkan akurasi rendah, jika nilai persentase deviasinya di atas 15% (Luru, 2014).

Perencanaan belanja satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) pengelola dana APBN dituangkan dalam halaman III Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang memuat informasi rencana penarikan dana satuan kerja K/L per jenis belanja dan perkiraan penerimaan dalam satu tahun anggaran yang dirinci dalam dua belas bulan. Rencana penarikan dana tersebut menjadi pedoman satuan kerja dalam merealisasikan belanja dan menjadi sumber data proyeksi perencanaan kas pemerintah. Data historis dan perencanaan kas yang disusun K/L merupakan salah satu unsur pembentuk Laporan Perencanaan Kas Pemerintah Pusat selain perencanaan kas yang berasal dari internal Kementerian Keuangan yaitu Komite Assets Liabilities Management (ALM) dan Tim Cash Planning Information Network (CPIN) (Sigit, 2019).

Serapan Anggaran pada Balai Besar Veteriner Wates (BBVet Wates) sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan menjadi bagian penilaian kinerja Kementerian Pertanian secara keseluruhan. Satker UPT yang tidak bisa mencapai target serapan anggaran akan mendapat nilai merah dan akan mendapat teguran baik secara lisan maupun tertulis dari Direktorat Jenderal Peternakan dan kesehatan hewan. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran juga dilakukan pada Balai Besar Veteriner Wates dengan menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan BBvet Wates dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja (Renja K/L) dalam satu tahun anggaran serta pembiayaan yang diperlukan untuk menyelesaikannya.

Hasil penilaian evaluasi pada instrumen indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, terdapat deviasi nilai pada indikator halaman III DIPA/indikator rencana penarikan dana Balai Besar Veteriner Wates yang melebihi angka 5% sebagai batas maksimum. Nilai indikator Deviasi Halaman III DIPA tahun 2022 satuan kerja Kantor Balai Besar Veteriner Wates adalah sebesar 26,16 dari skala 100. Dari 12 bulan, terdapat 4 bulan yang memiliki nilai deviasi kurang dari 5%, yaitu bulan Februari, Maret, April, dan September, sedangkan periode lainnya memiliki nilai deviasi lebih dari 5%. Selain itu, penyerapan anggaran di Balai Besar Veteriner Wates juga tidak sesuai dengan rencana dan realisasi yang telah disusun. Hal tersebut dibuktikan dengan rekap data berikut:

Tabel 1. Nilai Indikator Deviasi Halaman III DIPA Tahun 2022

Periode/ Bulan	RPD	Realisasi	% Penyerapan Anggaran	Rata-Rata Indikator Deviasi
Januari	713.037.162	69.570.418	9,76	7,35
Februari	1.107.368.939	17.254.399	1,56	0,85
Maret	2.108.578.962	50.306.362	2,39	1,05
April	2.633.460.257	109.218.207	4,15	2,4
Mei	1.689.786.252	61.630.906	3,65	34,72
Juni	3.310.016.875	1.781.492.064	53,82	66,38
Juli	2.501.877.311	91.965.754	3,68	35,32
Agustus	2.583.590.288	306.349.608	11,86	5,59
September	6.986.671.924	444.370.481	6,36	2,29
Oktober	15.168.982.220	5.716.905.218	37,69	48,03
November	14.215.025.709	5.105.135.556	35,91	48,96
Desember	14.215.025.709	5.105.135.556	35,91	48,96
Rata-Rata				26,15

Sumber: Data Primer Peneliti (2022)

Pelaksanaan kegiatan sesuai rencana akan memberikan kepastian waktu dan jumlah penarikan dana, sehingga perencanaan kas dapat dirumuskan dengan baik. Menurut Herriyanto (2011), pengguna anggaran mengabaikan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA dalam melakukan penarikan dana, sehingga Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) kesulitan mengontrol pengeluaran negara yang bersumber dari realisasi belanja satuan kerja K/L. Idealnya rencana penarikan dana yang telah disusun menjadi pedoman dalam merealisasikan kegiatan. Rendahnya nilai indikator Deviasi Halaman III DIPA menunjukkan bahwa terdapat gap yang tinggi antara rencana penarikan dana dengan realisasi belanja satuan kerja K/L.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk memahami penyebab terjadinya nilai deviasi pada indikator halaman III DIPA/indikator rencana penarikan dana dan merumuskan upaya mencegah terjadinya nilai deviasi pada indikator halaman III DIPA/indikator rencana penarikan dana pada Balai Besar Veteriner Wates.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk mengungkapkan hasil penelitian dengan menekankan gambaran obektif tentang keadaan sebenarnya pada obyek yang diteliti, sedangkan pendekatan kualitatif merupakan pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan menggunakan metode alamiah (Sugiyono, 2017).

Penelitian ini dilakukan di Balai Besar Veteriner Wates pada bulan September hingga November 2023. Subjek dalam penelitian ini adalah Ka Subkoordinator Keuangan, Staff Program dan Perencanaan, Kasubkoordinator Evaluasi dan Pelaporan, dan Staff KPPN BBVet Wates. Objek dalam penelitian ini adalah upaya sinkronisasi RPD dengan realisasi anggaran sesuai Implementasi Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian N/L.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa hasil wawancara dan sekunder berupa dokumen realisasi anggaran, RPD, IKPA, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data melalui wawancara; observasi dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap kegiatan pelaksanaan anggaran; dan dokumentasi berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktifitas dalam analisis data meliputi kegiatan reduksi data, display data, dan penarik kesimpulan (Sugiyono, 2017).

HASIL dan PEMBAHASAN

Hasil

Peneliti menggunakan data dari aplikasi kementerian keuangan terkait penilaian IKPA Satker Balai Besar Veteriner Wates tahun anggaran 2022 berdasarkan Kode KPPN 176, Kode BA 018 dan Kode Satker 239544 sebagai data pendukung observasi terhadap program pelaksanaan anggaran yang telah dijalankan, berikut indikator pelaksanaan anggaran pada tahun 2022:

Tabel 2. Indikator Pelaksanaan Anggaran Satker Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta

Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir
	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
Nilai	100	77,01	67,76	97	100	88,27	100	100	89,78	100%	89,78
Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
Nilai Akhir	10	7,7	13,55	9,7	10	8,83	5	25			
Nilai Aspek	88,51			90,61			100				

Sumber: Data Primer Peneliti (2022)

Tabel 2 menunjukkan hasil penilaian evaluasi pada instrumen IKPA Balai Besar Veteriner Wates tahun anggaran 2022 sebesar 89,78 atau berada pada rentan nilai $89 < \text{nilai} < 95$, yang berarti BAIK. Nilai tersebut merupakan nilai total dari beberapa indikator penilaian dengan bobot yang berbeda. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran pada Satker Balai Besar Veteriner Wates ialah Deviasi Halaman III yang diuraikan pada table berikut:

Tabel 3. Detail Indikator Halaman III DIPA Rencana dan Penyerapan RPD Satker BBVET Wates Tahun Anggaran 2022

Periode	Rencana				Penyerapan			
	51	52	53	57	51	52	53	57
'01	397.352.813	315.684.349	-	0	397.352.813	246.113.931	-	0

'02	432.052.622	675.316.317	-	0	432.052.622	658.061.918	-	0
'03	456.878.518	1.601.700.444	50.000.000	0	456.878.391	1.551.394.209	50.000.000	0
'04	844.746.153	1.788.714.104	-	0	862.170.378	1.880.508.086	-	0
'05	445.465.506	1.244.320.746	-	0	445.465.506	1.295.971.652	9.980.000	0
'06	848.675.046	2.461.341.829	-	0	436.860.932	1.215.611.879	123.948.000	0
'07	846.734.129	1.649.116.182	6.027.000	0	859.608.120	1.722.180.945	-	0
'08	435.832.009	2.147.758.279	-	0	449.538.218	1.855.114.880	-	0
'09	435.832.009	6.550.839.915	-	0	436.256.338	6.106.893.763	-	0
10	458.832.009	14.671.119.156	39.031.055	0	433.377.024	9.018.699.978	-	0
11	476.748.009	13.708.472.167	29.805.533	0	425.453.904	18.661.344.731	130.774.420	0
12	476.748.009	13.708.472.167	29.805.533	0	425.453.904	18.661.344.731	130.774.420	0

Sumber: Data Primer Peneliti (2022)

Tabel 3 menunjukkan detail indikator halaman III DIPA bagian kiri yang berisi rencana dan penyerapan dana pada bulan januari hingga desember tahun 2022, sedangkan tabel indikator halaman III DIPA berisi mengenai deviasi dan nilai IKPA yang selanjutnya ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4. Detail Indikator Halaman III DIPA Deviasi RPD Tahun Anggaran 2022

Periode	Deviasi				% Deviasi				% Deviasi Seluruh J.Bel	AVG % Deviasi Seluruh J.Bel	% Rata- Rata Deviasi Kumulatif	Nilai IKPA
	51	52	53	57	51	52	53	57				
01	-	69.570.418	-	0	0	22,04	0	0	22,04	7,35	7,35	92,65
02	-	17.254.399	-	0	0	2,56	0	0	2,56	0,85	4,1	100
03	127	50.306.235	-	0	0	3,14	0	0	3,14	1,05	3,08	100
04	17.424.225	91.793.982	-	0	2,06	5,13	0	0	7,19	2,4	2,91	100
05	-	51.650.906	9.980.000	0	0	4,15	100	0	104,15	34,72	9,27	90,73
06	411.814.114	1.245.729.950	123.948.000	0	48,52	50,61	100	0	199,13	66,38	18,79	81,21
07	12.873.991	73.064.763	6.027.000	0	1,52	4,43	100	0	105,95	35,32	21,15	78,85
08	13.706.209	292.643.399	-	0	3,14	13,63	0	0	16,77	5,59	19,21	80,79
09	424.329	443.946.152	-	0	0,1	6,78	0	0	6,88	2,29	17,33	82,67
10	25.454.985	5.652.419.178	39.031.055	0	5,55	38,53	100	0	144,08	48,03	20,4	79,6
11	51.294.105	4.952.872.564	100.968.887	0	10,76	36,13	100	0	146,89	48,96	22,99	77,01
12	51.294.105	4.952.872.564	100.968.887	0	10,76	36,13	100	0	146,89	48,96	22,99	77,01

Sumber: Data Primer Peneliti (2022)

Pada tabel 4 terlihat deviasi nilai pada indikator halaman III DIPA/indikator rencana penarikan dana Balai Besar Veteriner Wates yang melebihi angka 5% sebagai batas maksimum. Perolehan nilai deviasi tertinggi sebesar 66,38 pada periode 6 atau bulan Juni, nilai deviasi sebesar 48,96 pada periode 11 dan 12, yaitu bulan November dan Desember, nilai deviasi sebesar 48,03 pada periode 10 atau bulan Oktober, nilai deviasi 35,32 pada periode 7 atau Juli, dan nilai deviasi sebesar 34,72 pada periode 5 atau Bulan Mei.

Di Balai Besar Veteriner Wates, Deviasi Halaman III DIPA beberapa tahun ini muncul sebagai indikator yang tak mencapai target. Meskipun hanya sebagai salah satu dari delapan indikator yang menjadi unsur penilaian IKPA oleh Kementerian Keuangan dan hanya menyumbangkan 10% dari total nilai 100, dan dibandingkan dengan indikator lainnya, namun Deviasi Halaman III DIPA di BBVet Wates merupakan faktor penentu dalam Total Nilai IKPA, baik bulanan maupun tahunan. Hal ini dikerenakan untuk indikator-indikator lainnya seperti revisi DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan dan lain lain sampai dengan indikator capaian output telah tercapai secara maksimal.

Pembahasan

Penyebab Terjadinya Nilai Deviasi pada Indikator Halaman III DIPA di Balai Besar Veteriner Wates. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan adanya nilai deviasi pada indikator halaman III

DIPA/indikator rencana penarikan dana Balai Besar Veteriner Wates yang melebihi angka 5% sebagai batas maksimum. Hanya terdapat empat periode dalam satu tahun 2022 yang nilai deviasinya kurang dari 5%, yaitu bulan Februari, Maret, April, dan September. Selebihnya, terdapat deviasi lebih dari 5% pada setiap periodenya. Nilai deviasi tertinggi sebesar 66,38% ditemukan pada periode 6 atau bulan Juni, nilai deviasi sebesar 48,96% pada periode 11 dan 12, yaitu bulan November dan Desember, nilai deviasi sebesar 48,03% pada periode 10 atau bulan Oktober, nilai deviasi 35,32% pada periode 7 atau Juli, dan nilai deviasi sebesar 34,72% pada periode 5 atau Bulan Mei.

Penelitian Ratnasari (2022) juga menemukan adanya deviasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, dimana deviasi tinggi terjadi pada bulan Maret, April, Mei, September, Oktober, November, dan Desember 2019. Pada tahun 2020, deviasi tinggi terjadi pada bulan Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, dan Oktober 2020. Pada tahun 2021, deviasi yang tinggi terjadi pada bulan September, Oktober, dan November 2021. Penelitian tersebut menemukan tiga faktor penyebab tingginya deviasi, yaitu perencanaan anggaran yang belum ideal, koordinasi internal antar bagian yang lemah, dan keterbatasan kompetensi sumber daya manusia.

Hasil wawancara menunjukkan beberapa penyebab terjadinya deviasi nilai RPD di IKPA BBVet Wates:

1. Faktor pertama, adanya perencanaan yang tidak akurat

Terdapat beberapa kegiatan yang sudah dicantumkan dalam halaman III DIPA/indikator rencana penarikan dana tidak dilaksanakan sesuai rencana atau pelaksanaannya menyimpang dari perencanaan, sehingga mengakibatkan deviasi lebih dari 5%. Pada saat penyusunan anggaran, tim perencanaan melakukan prediksi pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada tahun berikutnya, dalam realisasinya ada perbedaan rencana dan realisasi pelaksanaan anggaran sehingga menyebabkan deviasi.

Proyeksi pelaksanaan kegiatan belum memedomani rancangan pelaksanaan kegiatan yang disusun TOR kegiatan, hal ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan dan realisasi keuangan berbeda dengan rencana awal di TOR, beberapa pelaksana kegiatan cenderung menunda pelaksanaan kegiatan.

2. Faktor kedua, adanya kemunduran jadwal belanja dari jadwal yang sudah ditentukan

Realisasi belanja bahan seringkali mengalami kemunduran dari bulan yang sudah dijadwalkan terkait dengan aturan TKDN yang harus meminta ijin ke menteri pertanian. Terdapat ketidakpastian dalam belanja kontraktual, yang dikontrakkan dalam jangka waktu panjang (diatas 6 bulan), terutama untuk selesai pekerjaan pada pembelian bahan pengujian sehingga tim perencana kesulitan untuk memperkirakan pada bulan apa akan dilakukan pembayaran. Adanya kegiatan-kegiatan yang pelaksanaannya mundur dari jadwal juga disebabkan karena keterbatasan jumlah SDM

3. Faktor ketiga, list CPCL tidak disampaikan secara serempak

Pihak BBVet Wates seringkali dibuat menunggu daftar Calon Penerima dan Calon Lokasi terkumpul dengan lengkap baru dilakukan tindak lanjut penyaluran bantuan kepada kelompok penerima. Sejauh ini, penyampaian daftar CPCL tidak dilakukan secara serempak sehingga menyebabkan distribusi BANPEM mengalami kemunduran dari jadwal yang sudah dibuat.

4. Faktor keempat, adanya keterlambatan juknis

Keterlambatan juknis kegiatan dari eselon I mengakibatkan kegiatan tidak sesuai dengan rencana pada halaman III DIPA/indikator rencana penarikan dana. Menurut Alvaro dan Riyono (2020), juknis masih menjadi permasalahan tahunan pada implementasi DAK dalam kurun waktu 2003 hingga 2011. Sama halnya Aprijon (2019) juga menyatakan bahwa penyerapan DAK Fisik terhambat dikarenakan juknis terlambat terbit, dan permasalahan ini selalu berulang hingga kini.

5. Faktor kelima, penetapan bantuan yang bersifat politis atau bergantung pada faktor eksternal

Penetapan bantuan pemerintah yang bersifat politis mengakibatkan satgas harus menunggu persetujuan dari DPR untuk meninjau pelaksanaan kegiatan lebih lanjut. Selain itu, terdapat beberapa kegiatan dengan anggaran besar yang dalam pelaksanaannya tergantung dari faktor eksternal, misalnya kegiatan di 1785 Pengembangan Bibit dan Produksi Ternak, yang pelaksanaannya tergantung oleh Direktorat Perbibitan dan Produksi.

6. Faktor keenam, revisi DIPA DJA/ Eselon I yang mengembalikan RPD halaman III DIPA pada keadaan DIPA awal yang tidak dimutakhirkan kembali, sehingga menyebabkan perbedaan rencana anggaran.

Hasil diatas menunjukkan adanya deviasi sebagian besar disebabkan karena faktor SDM. Sesuai penelitian (Arnida, 2022) tingkat deviasi Halaman III DIPA atau indikator rencana penarikan dana

dipengaruhi oleh masalah sumber daya manusia dan sarana prasarana, masalah kebijakan realokasi/administrasi, dan masalah pelaksanaan kegiatan.

Upaya Mencegah Terjadinya Nilai Deviasi pada Indikator Halaman III DIPA di Balai Besar Veteriner Wates

BUN menyediakan kas setiap bulan menggunakan data RPD yang ditemukan di halaman III DIPA. Untuk memastikan bahwa BUN memberikan jumlah kas yang diperlukan secara akurat, sangat penting bahwa datanya akurat. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) membuat metrik untuk mengevaluasi ketepatan data RPD halaman III DIPA dibandingkan dengan realisasi anggarannya karena peran penting RPD dalam pengelolaan kas (Suprianto, 2022).

Sebagai salah satu dari delapan indikator yang menjadi unsur penilaian IKPA dan hanya menyumbang 10% dari total nilai 100, namun Deviasi Halaman III DIPA merupakan faktor yang cukup menjadi penentu (PTA Bandar Lampung, 2023). Meskipun RPD halaman III DIPA sudah menjelaskan dan menentukan prosentase penetapan anggaran pada masing-masing sisi, nyatanya masih banyak ditemukan deviasi yang nilainya sangat tinggi, jauh di atas 5%. Upaya mencegah terjadinya nilai deviasi pada indikator halaman III DIPA di Balai Besar Veteriner Wates ialah sebagai berikut:

a. Faktor pertama

Diperlukan adanya koordinasi antar bidang baik bidang perencanaan atau kegiatan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui reviu Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) atau menjadwalkan kembali setiap minggu kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menyesuaikan halaman III DIPA. Penelitian Arnida (2022) menemukan bahwa masalah pelaksanaan kegiatan lebih berkaitan dengan koordinasi satker internal dan eksternal dalam penyusunan RPD.

b. Faktor kedua

Satgas diharapkan untuk merealisasikan RPD yang paling mendekati rencana realisasi pada saat penyusunan anggaran dilakukan. Sementara itu, mundurnya kegiatan-kegiatan dari jadwal yang disebabkan karena keterbatasan SDM perlu mendapat tindak lanjut secepatnya dalam menambah jumlah SDM yang kompeten sesuai kebutuhan.

Upaya mencegah deviasi dengan melakukan Revisi Kanwil untuk perbaikan RPD bulanan yang disesuaikan dengan realisasi pembayaran (SP2D) setiap awal triwulan sebelum tanggal 10, memastikan dilaksanakannya ketentuan mengenai pembayaran gaji, tunjangan, honorarium, belanja langganan, mengingat pada komponen gaji terdapat unsur gaji ketigabelas dan keempat belas, serta adanya gaji dan tunjangan diajukan dua kali pada bulan Desember.

c. Faktor ketiga

Peran pemimpin untuk mengevaluasi dan meningkatkan motivasi kerja satgas agar bersedia melengkapi dokumen atau list CPCL tepat waktu, sehingga pelaksanaan BANPEM berjalan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Menurut (Yusup dan Yuniarti, 2022) kemampuan dan keahlian akan tidak berguna jika tidak diikuti oleh moral kerja dan kedisiplinan pegawai untuk mencapai tujuan kinerja yang tinggi. Peranan seorang pemimpin termasuk mendorong, mengarahkan, dan mengawasi bawahannya.

d. Faktor keempat

Diperlukan koordinasi yang aktif antara bidang perencanaan, pelaksana kegiatan, dan keuangan untuk menyusun RPD dengan memprioritaskan kegiatan rutin dan kegiatan-kegiatan yang sudah memiliki juknis, mengingat beberapa kegiatan yang sudah direncanakan kadang pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang disusun.

e. Faktor kelima

Meningkatkan koordinasi dengan tim pusat terutama kegiatan yang dipengaruhi faktor eksternal sehingga dapat lebih tepat memperkirakan pelaksanaan kegiatan untuk memprediksi Rencana Penarikan Dana (terutama untuk kegiatan Bantuan Pemerintah Hewan Ternak).

f. Faktor keenam

Diperlukan update halaman III DIPA secara berkala setiap triwulan dan memastikan deviasi antara pelaksanaan dan perencanaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA tidak lebih dari 5%. Upaya lain dengan mensosialisasikan kepada tim BBVet Wates mengenai nilai IKPA sebagai parameter pengukur keberhasilan, sehingga baik tim perencanaan, keuangan, pengadaan maupun tim pelaksana kegiatan dapat lebih intens dan konsisten dalam penganggaran dan pelaksanaan kegiatan.

Mengajukan usulan kepada tim keuangan eselon satu untuk dapat meningkatkan perhatian dan menentukan target nilai IKPA kepada seluruh satker, sehingga bukan hanya nilai Serapan Anggaran yang menjadi perhatian penting bagi satker. Seperti halnya yang tertuang dalam laporan Kementerian

Keuangan RI Kanwil DJOb DII (2024) bahwa tantangan strategis pada deviasi halaman III DIPA diantaranya adalah belum menyusun rencana kegiatan dan proyeksi pencairan secara akurat dan koordinasi penjadwalan revisi anggaran terpusat belum optimal. Oleh karenanya, setiap Lembaga.

Mendukung hasil diatas, laporan Kementerian Kesehatan RI pada Kantor kesehatan Pelabuhan Cilacap (2022), dalam Rencana Aksi Kegiatan periode 2020–2024 juga disebutkan beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencapai nilai indikator kerja pelaksanaan anggaran dilakukan dengan strategi berikut:

- a. Koordinasi dengan lintas program selaku pelaksana anggaran tentang RPK dan RPD
- b. Koordinasi dengan pejabat pengadaan barang/jasa tentang RUP
- c. Input data penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, capaian output setiap hari dalam aplikasi ON SPAN
- d. Melakukan revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA
- e. Pencatatan dan pelaporan pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM
- f. Peningkatan kapasitas SDM/ petugas pengelola anggaran

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1). Penyebab terjadinya nilai deviasi pada indikator halaman III DIPA/indikator rencana penarikan dana di Balai Besar Veteriner Wates adalah: a) adanya perencanaan yang tidak akurat, b) kemunduran jadwal belanja dari jadwal yang sudah ditentukan, c) list CPCL tidak disampaikan secara serempak, d) adanya keterlambatan juknis, e) penetapan bantuan yang bersifat politis dan bergantung pada faktor eksternal, dan f) revisi DIPA DJA yang mengembalikan RPD tidak dimutakhirkan kembali; 2). Upaya mencegah terjadinya nilai deviasi pada indikator halaman III DIPA/indikator rencana penarikan dana di Balai Besar Veteriner Wates adalah: a) koordinasi antar bidang dengan PPK melalui review POK dan menjadwalkan kembali kegiatan yang akan dilaksanakan, b) mengajukan izin pembelian diawal tahun, merealisasikan RPD yang paling mendekati rencana, dan menambah jumlah SDM, c) peran pemimpin untuk mengevaluasi dan meningkatkan motivasi kerja, d) koordinasi antara bidang perencanaan, pelaksana kegiatan, dan keuangan untuk menyusun RPD dengan memprioritaskan kegiatan rutin yang sudah memiliki juknis, e) meningkatkan koordinasi dengan tim pusat sehingga dapat lebih tepat memperkirakan pelaksanaan kegiatan untuk memprediksi RPD, dan f) diperlukan update halaman III DIPA secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

1. Alvaro, R. and Riyono, T. (2020) 'Dampak Keterlambatan Petunjuk Teknis K/L Terhadap Penyerapan DAK Fisik', Buletin APBN, 5(4).
2. Andriani, W. and Hatta, E. (2013) 'Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Pusat (Studi pada Politeknik Negeri Padang)', Jurnal Akuntansi & Manajemen, 7(2).
3. Arnida, A. (2022) 'Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Deviasi Halaman III DIPA pada Satker Lingkup Kemenag Bangka Belitung', Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, 4(1).
4. Herriyanto, H. (2011) 'Faktor-faktor Utama yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga', Jurnal Kebijakan Ekonomi, 7(1).
5. Luru, P. (2014) 'Mekanisme Perkiraan Pencairan Dana dan Tingkat Realisasi Anggaran pada KPPN Poso', Jurnal Ilmiah Ekomen, 14(2).
6. Mardiasmo (2018) Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru. Yogyakarta: ANDI.
7. PTA Bandar Lampung (2023) 'Deviasi Halaman III DIPA, Indikator Penting Bagi Kualitas Pelaksanaan Anggaran Satker. Mahkamah Agung RI'. Available at: <https://pta-bandarlampung.go.id/berita-seputar-peradilan/951-deviasi-halaman-iii-dipa-indikator-penting-bagi-kualitas-pelaksanaan-anggaran-satker.html> (Accessed: 25 January 2024).
8. Ratnasari, D. (2022) 'Menilik Penyebab Deviasi antara Rencana dengan Realisasi Belanja Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga: Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro', Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 11(2).
9. Risqon, D.P. (2012) 'Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi, dan Kemampuan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan', Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya, 13(1).
10. Rizaldi, M. (2018) 'Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Efektivitas Perencanaan Kas Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga di Wilayah Kerja KPPN Lingkup Kanwil DJPb



- Provinsi Bengkulu', Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 31.
11. Sigit, A. (2019) 'Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Akurasi Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian Satuan Kerja Kementerian/Lembaga', Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 4(2).
 12. Sugiyono (2017) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
 13. Suprianto, E. (2022) 'Optimalisasi Nilai Indikator Deviasi Halaman III DIPA dalam IKPA', Bangkapos.com. Available at: <https://bangka.tribunnews.com/2022/11/21/optimalisasi-nilai-indikator-deviasi-halaman-iii-dipa-dalam-ikpa> (Accessed: 23 January 2024).
 14. Sya'baniyah, N. (2020) Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pada Satuan Kerja Balai Besar Rehabilitasi Bnnlido Bogor. Doctoral dissertation. Universitas Djuanda.
 15. Wirawan (2011) Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
 16. Yusup, A. and Yuniarti, R. (2022) 'Peran Pimpinan dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan', Jurnal Mentari Publika(3), p. 1.

